Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 3509-3514
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4555

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Daerah pada Provinsi Riau Tahun 2017-2021

Yois Nelsari Malau*, Iis Dahlia Silitonga, Riris Jesica Silaban, Nisa Hasugian, Belthasar Trito Siahaan
Universitas Prima Indonesia
Politeknik Negeri Manado
*Correspondence: yoisnelsarimalau@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian berikut yakni mengetahui dampak sesungguhnya DAK, PAD, DBH, DAU serta inflasi mengenai belanja daerah. Populasi serta sampel adalah 12 Kabupaten/Kota dari tahun 2017-2021, dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,953 yaitu sebesar 95,3% untuk DAK, PAD, DBH serta inflasi pada belanja daerah dan 4,7% untuk variabel bebas lainnya. Hasil pembahasan mengindikasikan sesungguhnya DAK, PAD, DBH, dan DAU mempunyai dampak terpisah, namun inflasi berdampak negatif kepada belanja daerah. DAK, PAD, DAU, DBH serta inflasi menurut keseluruhan berdampak pada Belanja Daerah.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi dan Belanja Daerah.

Abstract. *The purpose of the following research is to find out the real impact of SAF, ROR, PSF, GAF and inflation on regional spending. The population and sample are 12 districts/cities from 2017-2021, using a saturated sampling technique. The coefficient of determination is 0.953, which is 95.3% for SAF, ROR, PSF and inflation in regional spending and 4.7% for other independent variables. The results of the discussion indicate that actually SAF, ROR, PSF, and GAF have separate impacts, but inflation has a negative impact on regional spending. SAF, ROR, PSF, GAF and inflation in their entirety had an impact on Regional Expenditures.*

Keywords*: Regional Own Revenue (ROR), General Allocation Fund (GAF), Special Allocation Fund (SAF), Profit Sharing Fund (PSF), Regional Inflation and Expenditures.*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah di Indonesia berkembang pesat, sejalan bersama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Indonesia mengaplikasikan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian menjelma kedalam UU No. 32 Tahun 2003 setelah direvisi mengenai pemerintahan daerah. Penerapan pada otonomi daerah bakal mengusung dampak subtil, bahwasanya setiap wilayah mesti mampu dalam mengkaryakan diri sendiri untuk hajat ekonomi, pembangunan kemasyarakatan, serta memenuhi keperluan dalam mengembangkan daerah implementasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013). Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi, melalui pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program pembangunan daerah dan perencanaan lain yang didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Kharisma, 2013).

Hasil dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adanya pemisahaan kekuasaan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (moneter dan fiskal yang didesentralisasi kepada daerah) (Hadi & Saragih, 2013). Otoritas pemerintah daerah dalam penerimaan anggaran harus mampu mendukung pertumbuhan belanja daerah untuk mewujudkannya kesejahteraan masyarakat dari semua kota atau provinsi di Indonesia. PAD adalah sumber pendanaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Namun, banyak daerah yang masih bergantung pada sumber pendanaan lain dan tidak mengelola PAD yang dimiliki. Selain PAD pemerintah daerah juga memiliki dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang berasal dari pajak dan SDA. Seperti kasus yang dilansir antaranews.com pada september 2021, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, memaklumatkan penyelenggaraan keuangan daerah belum praktis, berhasil, serta bermanfaat saat menopang pembangunan ataupun meminimalisir kesenjangan. Lain dari itu, belanja didaerah pun dikatakan belum produktif

karena kebanyakan merupakan bagi belanja karyawan dengan besaran 32,4%, padahal belanja infrastruktur dan jasa publik cuma 11,5%. Terjadi sebab pemanfaatan DAK serta DAU yang tak selaras pada tujuannya yakni malah dimanfaatkan guna Belanja Modal serta Belanja Pegawai. Tatkala, inti dari DAU yakni guna menyerahkan bantuan mendasar untuk masyarakat serta meminimalisir kesenjangan, lain halnya DAK yang bertujuan guna penopang dari semua APBD ataupun TKDD. Bukan saja itu, Menkeu juga menerangkan dana pemerintah diperbankan yakni Rp173,3 T per Juli 2021 sebab model absorbs belanja yang tetap berorientasi pada bisnis seperti biasanya yang meroket dalam triwulan IV. Model belanja APBD yang tetap bisnis seperti biasanya pun berpedoman dalam triwulan IV. Sementara itu, pada keadaan covid-19 ini mengawasi seluruh pengiriman dapat secara serentak dirasakan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, realisasi APBD Provinsi Riau pada triwulan IV 2020 terlihat relative kecil jika dijajarkan dengan pelaksanaan di APBD kuartal IV 2019. Wujud dari belanja Provinsi Riau 2019 menyentuh angka 92,75% atau setara dengan Rp8,77 T. Tekontraksi sampai 5,89% (yoy) jika disandingkan pada tahun 2020 yang menyentuh 91,53% atau Rp8,48 T dari pagu anggaran. Kondisi keuangan daerah berpengaruh terhadap lokasi belanja daerah itu sendiri. Sehingga jika melesatnya level dependensi belanja daerah kepada inventasi, memperlihatkan dependensi daerah kepada investasi pemerintah pusat.

Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah. Menurut Rosidin (2015), setiap tahun kebutuhan pemerintah dan masyarakat semakin meningkat di setiap daerah. Akibatnya, tingkat alokasi belanja daerah terus meningkat. Namun, dari biaya tersebut hanya belanja daerah yang bergantung pada kapasitas guna mencukupi kebutuhan pemerintah, diharapkan pemerintah daerah dapat mencari sumber pendanaan melalui PAD. Menurut Devita, dkk (2014), anggaran yang dipunyai oleh pemda akan lebih tinggi jikalau PAD sebuah daerah bertambah, sehingga pemda aktif menggali sumber-sumber potensial di daerah. Alasan tersebut menunjukkan kapasitas daerah pun meningkat serta pengeluaran daerah pun akan meningkat jikalau PADnya pun meningkat.
2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah. Menurut Rosidin (2015), komoditas keuangan suatu daerah diperbesar, tetapi tidak ada daerah yang mampu sepenuhnya menutupi anggarannya sendiri. Jika masih ada kekurangan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, kekurangan dapat dipenuhi melalui hibah dari pemerintah pusat. Menurut Aqnisa (2016), DAU berdampak bagus kepada belanja daerah karena saat DAU dialokasikan tinggi lalu pengeluaran daerah pun tinggi. Sebuah penelitian Apriliawati (2016), mengatakan sesungguhnya pertumbuhan DAU diiringi kenaikan yang kian besar dalam belanja daerah.
3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah. Menurut Sunarno (2016), DAK dialokasikan kepada daerah tertentu oleh APBN sebagai bagian dari permodalan aktualisasi desentralisasi guna membiayai aktivitas tertentu yang dipilih oleh pemerintah berdasarkan prerogative nasional, selain itu pula membiayai aktivitas ekslusif pada wilayah spesifik. Menurut Ferdiansyah, dkk. (2018), setiap DAK mentransfer itu yang diterima oleh pemerintah daerah diindikasikan guna belanja daerah, tak sedikit saat pemda memutuskan agenda belanja daerah secara yakin supaya pemindahan DAK yang diserahkan dari pemerintah pusat bisa lebih banyak. Penelitian Ni Luh Dina, dkk.(2014), meningkatkan sarana serta prasarana menggunakan DAK yang diserahkan dari pemerintah pusat, hal ini bisa menolong untuk meminimalis kesengsaraan serta mungkin mengembangkan perekonomian nasional.
4. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah. Semakin tinggi DBH, semakin banyak harapan untuk tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa daerah dengan DBH besar juga akan memiliki belanja daerah cenderung besar. DBH merupakan sumber dari potensi pendapatan sebagai dasar kebutuhan finansial pembangunan dan belanja daerah. Semakin tinggi DBH, semakin tinggi harapan perkembangan yang lebih tinggi. Sebuah penelitian Aqnisa (2016), melaporkan bahwasanya DBH memiliki dampak buruk kepada belanja daerah.

5. Pengaruh Inflasi terhadap Alokasi Belanja Daerah. Menurut Sadono (2016), laju inflasi yang tak konstan dapat memperumit bisnis, menjadikan masyarakat tidak mau berinvestasi serta mendepositokan, lalu menahan agenda ekspansi pemerintah, mengganti format APBD serta APBN, serta masih beragam lagi efek buruk kepada perekonomian secara menyeluruh. Menurut Mahmudin (2016), untuk menentukkan apakah kenaikan tersebut masih dalam kisaran wajar, perlu mempertimbangkan berapa besar inflasi, berapa layanan cakupan tambahan, perkembangan masyarakat, belanja yang sangat besar berdampak pada ekskalasi pertumbuhan, sebab ekskalasi terhadap belanja, apakah ekskalasi belanja disebabkan sebab aspek domestic yangrelatif terkonsep atau aspek eksternal yang diluar lagam pemda..

METODE

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi berdasarkan penelitian-penelitian lainnya yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data berupa Laporan Realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Riau yang diperoleh dari BPS Provinsi Riau periode 2017-2021. Sumber data website https://riau.bps.go.id. Populasi dan sampel berjumlah 12 Kabupaten/Kota pada Provinsi Riau periode 2017-2021, dengan mengunakan teknik sampling jenuh. Dengan periode penelitian 5 tahun, sehingga jumlah observasi penelitian ini ialah 60 (12 kali 5). Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai metodologi penelitian dan sifat penelitian deskriftif. Uji Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Ghozali, 2018)

1. Uji Normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan mengunakan metode one sampel kolmogorov-smirnov test, uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas.
2. Uji Multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, dari nilai VIF dan Tolerance. Model regresi tanpa multikolinearitas memiliki nilai VIF < 10 dan angka tolerance > 0,1. Jika nilai VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,1, maka akan terjadi gejala multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi. Deteksi autokorelasi pada data panel dapat diuji melalui Durbin-Watson. Tabel Durbin-watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif/negatif. Kriteria pengujian Durbin-watson bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif, bila angka DW-2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi, bila angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negatif.
4. Uji Heterokedastisitas. Dalam mendeteksi uji heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual).

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Model regresi yang digunakan yaitu:

Y = a + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 + e

Dimana : Y = Belanja Daerah; a = Konstanta; ß1ß2ß3ß4ß5 = Koefisien regresi X1 = PAD; X2 = DAU X3 = DAK X4 = DBH; X5 = inflasi; e = Kesalahan residual.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai adjusted R² yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terikat sangat terbatas. Semakin tinggi nilai adjusted R² maka semakin tinggi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat.

Uji Hipotesis

1. Uji F. Uji F digunakan untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen .
2. Uji t. Uji statistik t (test) digunakan untuk

menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriteria pengambilan keputusan nilai signifikansi < 0,05 maka variabel independen secara individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, nilai signifikansi > 0,05 maka variabel independen secara individual tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL

Tabel 1
Kolmogorov-Smirnov (k-s)

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
Most Extreme Differences	Std. Deviation	176782889.91432706
	Absolute	.094
	Positive	.091
	Negative	-.094
Kolmogorov-Smirnov Z		.729
Asymp. Sig. (2-tailed)		.663

Sumber : data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa nilai signifikansi 0,663 sehingga dapat ditarik kesimpulan data residual berdistribusi secara normal. Tabel 2 menjelaskan hasil uji menunjukkan nilai tolerance memiliki besaran lebih besar dari > 0,10 dengan nilai VIF lebih kecil dari < 10,00 sehingga tak terjadinya multikoloniearitas. Sedangkan Tabel 3 hasil uji diperoleh Durbin Watson sebesar 1,415 dengan n = 60 dan k = 5, sehingga didapatkan nilai DL dengan besaran 1,4083 serta DU dengan besar 1,7671. Sebab nilai DW sebesar 1,415 diatas 1,4083 (1,4083 < 1,415 < 1,7671) sehingga tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan Gambar 1 menjelaskan hasil uji tidak adanya skema spesifik, sebab dapat dilihat bahwa titik menyebar secara tak beraturan, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tak terjadi fenomena heteroskedastisitas

Tabel 2
Uji Multikoloniearitas

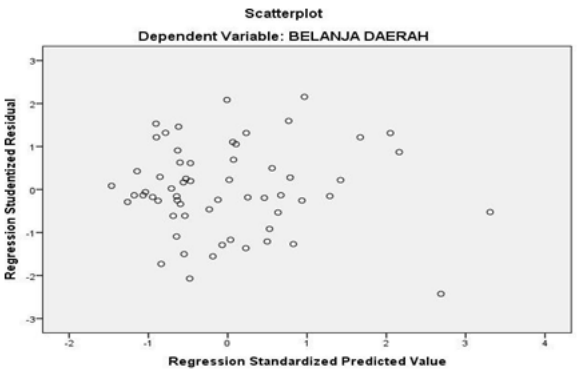
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PAD	.945	1.058
DAU	.703	1.423
DAK	.845	1.183
DHB	.787	1.270
Inflasi	.987	1.013

Sumber : data olahan

Tabel 3
Uji Autokorelasi

Model	Durbin Watson
1	1.415

Sumber : data olahan



Sumber : data olahan

Gambar 1
Uji Heterokedastisitas

Tabel 4
Persamaan Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	106815857.120	92395468.029		1.156	.253
PAD	.916	.105	.256	8.693	.000
DAU	1.443	.119	.441	12.153	.000
DAK	1.108	.244	.141	4.538	.000
DBH	1.077	.038	.961	28.093	.000
Inflasi	-34469737.786	18502629.177	-.053	-1.863	.068

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel 4 dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda pada model penelitian ini yaitu: Belanja Daerah = 106815857.120 + 0.916PAD + 1,443DAU + 1,108DAK + 1,077DBH - 34469737.786Inflasi. Maksud dari persamaan tersebut adalah :

1. Jumlah hasil konstanta adalah 106815857.120 artinya jika nilai DAU, DAK, PAD, DBH serta inflasi diibaratkan tak berganti, lalu BD tahun 2017-2021 adalah 106815857.120
2. PAD berdampak baik pada nilai koefisien dengan besaran 0,916 maksudnya semua kenaikan PAD satu satuan, nilai PAD bertambah sebesar 0,916 satuan.
3. DAU berdampak positif kepada nilai koefisien dengan besaran 1,443 maksudnya tiap kenaikan DAU satu satuan, nilai DAU bertambah sebesar 1,443 satuan.
4. DAK berpengaruh positif terhadap nilai koefisien dengan besar 1,108 maksudnya tiap ekskalasi DAK satu satuan, nilai DAK bertambah sebesar 1,108 satuan.
5. DBH berdampak positif kepada nilai koefisien dengan besar 1,077 maksudnya tiap peningkatan DBH satu satuan, nilai DBH bertambah sebesar 1,077 satuan.
6. Inflasi berdampak negatif terhadap nilai koefisien -34469737.786 yaitu setiap kali Inflasi turun satu satuan maka nilai INFLASI -34469737.786 berkurang satu satuan

Tabel 4 juga menunjukkan hasil uji secara parsial, yakni:

1. Nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0,000 dengan nilai t-hitung 8,693 serta total t-tabel 2,39012 serta nilai signifikansi sebesar 0,05 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya nilai t-hitung > t-tabel (8,693 > 2,39012), jika nilai signifikannya < 0,05 maka Ha diterima namun H0 ditolak, lalu bisa dianggap bahwa PAD berdampak signifikan serta positif kepada Belanja Daerah.
2. Nilai signifikansi dari variabel DAU yakni dengan besaran 0,000 serta nilai t-hitung 12,153 serta total t-tabel 2,39012 serta nilai signifikansi sebesar 0,05 bisa diirangkum bahwa nilai t-hitung > t-tabel (12,153 > 2,39012), jika nilai signifikannya < 0,05 maka Ha diterima lalu H0 ditolak, dirangkum menjadi DAU berdampak signifikan dan positif kepada Belanja Daerah.
3. Nilai signifikansi variabel DAK sebesar 0,000 dan nilai t-hitung 4,583 serta bahwasanya nilai t-hitung > t-tabel (4,583 > 2,39012), jika nilai signifikannya < 0,05 lalu yang terjadi Ha diterima dan H0 ditolak, lalu dirangkum menjadi DAK berdampak signifikan dan positif pada Belanja Daerah.
4. Hasilnya, nilai signifikansi untuk variabel DBH memiliki besaran 0,000 bisa disebut juga bahwasanya nilai t-hitung > t-tabel (28,093 > 2,39012), dan nilai signifikannya < 0,05 jadi Ha diterima dan H0 ditolak, lalu DBH berdampak signifikan dan positif kepada Belanja Daerah.
5. Nilai signifikansi variabel INFLASI sebesar 0,068 dan nilai t-hitung -1,863 serta total t-tabel 2,39012 serta nilai signifikansi sebesar 0,05 dapat dirangkum bahwasanya nilai t-hitung < t-tabel (-1,863 < 2,39012), serta nilai signifikannya > 0,05 jadi Ha ditolak dan H0 diterima, lalu dirangkum menjadi INFLASI berdampak signifikan serta buruk pada Belanja Daerah.

Tabel 5
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adj. R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistic	
					R Square Change	F Change
1	.978a	.957	.953	13241206.657	.957	241.355

Sumber : data olahan

Tabel 5 menjelaskan hasil uji menunjukkan jumlah koefisien determinasi yang telah ditentukan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,953; yang maksudnya 95,3% variabel terikat (BD) mampu diterapkan terhadap variabel bebas diantaranya PAD, DAU, DAK, DBH, dan inflasi sebesar 4,7% diuraikan melalui variabel lain diluar variabel yang dipakai. Sedangkan Tabel 6 menyimpulkan hasil dari uji F menunjukkan total F-hitung sebanyak 241,355 dengan total signifikan 0,000, dan F-tabel dengan jumlah 2,37. Maka disimpulkan F-hitung > F-tabel ialah 241,355 > 2,37; dapat ditarik kesimpulan Hα diterima Ho ditolak, artinya variabel DAU, PAD, DAK, INFLASI, DBH, adanya pengaruh berarti pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2017- 2021

Tabel 6
Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2115806275251708000.000	5	423162559050341400.000	241.355	.000
	Residual	94676729301163610.000	54	1753272764363632.000		
	Total	2210483008826334000.000	59			

Sumber : data olahan

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH dan memiliki pengaruh dan signifikan pada Belanja Daerah Provinsi Riau 2017-2021, namun secara parsial hanya inflasi yang tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Daerah Provinsi Riau 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

Aqnisa, R. F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Apriliawati, K. N. & Handayani, N. 2016. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(2).

Devita, Andri, Arman Delis, Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2)

Ferdiansyah, dkk. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mulawarman Samarinda.

Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, Edisi Sembilan. Semarang: Badan dan Penerbit Universitas Diponegoro

Hadi, Sofian,. & Saragih, Tommy M. 2013, Ontologi Desentralisasi Fiskal dalam Negara Kesatuan. *Perspektif*, 18(3), 169-179

Kharisma, Bayu. 2013, Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 14(2), 101-119

Mahmudin, M. 2016. Implementasi Pembekalan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Millah: Journal of Religious Studies*, *15*(2), 299–318.

Ni Luh Dina Selvia Martini., dkk. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2

Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia

Sunarno, Siswanto, 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Samad, R. Putra dan Iyan, Rita Yani.l2013. Analisis potensi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru.

Sadono Sukirno. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali Pers